

PENGARUH KOMPETENSI, PERAN APARAT DESA, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MOJOGEDANG KARANGANYAR JAWA TENGAH

Hanif Dwi Kuncahyo¹ & I Gede Made Artha Dharmakarja^{2*}

¹ hanifkun10@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

² dharmakarja@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

*penulis korespondensi

Abstract

The characteristics of good governance are indicated by the accountability of financial management. The village government needs to apply the principle of accountability for financial management to their communities. Accountability is influenced by several factors, including competence, the role of village officials, and the use of information technology. This study aims to determine the effect of these factors on the accountability of village financial management. The type of data used in this study is primary data. The quantitative research method was carried out by distributing questionnaires to 13 villages as many as 96 respondents from Village Heads and Village Financial Managers in Mojogedang District, Karanganyar Central Java. This research uses multiple linear regression analysis with SPSS application. The results of this study indicate that simultaneously, the competence, the role of village officials, and the use of information technology have a significant effect on the accountability of village financial management. Partially, the role of village officials and the use of information technology also significantly influence the accountability of village financial management. However, partially the competence of village officials has no significant effect on the accountability of village financial management. Village officials are able to manage finances because of simple types of transactions supported by the Siskeudes application and assistance, so they don't need special skills.

Keywords : Competence, Financial Accountability, Role of officers, Utilization of Information Technology.

Abstrak

Ciri-ciri Tata Pemerintahan yang baik ditunjukkan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah desa perlu menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa. Akuntabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan menyebar kuesioner ke 13 desa sebanyak 96 responden Kepala Desa dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di Kecamatan Mojogedang, Karanganyar Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara parsial, peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun secara parsial kompetensi aparat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa mampu mengelola keuangan karena jenis transaksi sederhana yang didukung aplikasi Siskeudes dan pendampingan sehingga tidak perlu keahlian khusus.

Kata kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Aparat Desa.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan otonomi daerah yang memberikan kewenangan mengatur sendiri keuangan daerah dan desa. Desentralisasi fiskal akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Isufaj, 2014). Pemerintah pusat memberikan transfer dana dalam bentuk block grant, dana alokasi khusus dan dana desa. Penyaluran dana desa dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan penyaluran dana desa sejak tahun 2015 mengalami peningkatan setiap tahun kepada sebanyak 74.953 desa sesuai data tahun 2020 (Sumarto, 2020). Peraturan Menteri



Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparan, partisipatif, dan akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan tersebut digunakan perangkat desa sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas adalah salah satu prinsip dalam mengelola keuangan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Makalalag et al., 2017; Lukito, 2014; Huque, 2011). Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan karakteristik bagi lembaga sektor publik (Adhikari & Mellemvik, 2011; Tran et al., 2021). Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas di sektor publik, seperti kapasitas lembaga, keterlibatan pemangku kepentingan, tingkat korupsi, standar dan kepatuhan terhadap peraturan (Kim, 2009; Said et al., 2015; Keerasuntonpong et al., 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020, salah satu prioritas dana desa mulai tahun anggaran 2020 telah dianggarkan untuk bantuan langsung tunai (BLT). BLT tersebut diberikan kepada penduduk kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Situs resmi kemendesa.go.id (2020) menyampaikan salah satu penyebab 5.510 desa belum menyalurkan BLT tahap 1 karena belum menyampaikan APBDes. Berdasarkan hasil monitoring tim BPKP (2019), banyak desa yang terhambat pada pembuatan APBDes dan laporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa perlu memposting APBDes ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yaitu aplikasi untuk meningkatkan kualitas keuangan (Sulina et al., 2017). Beberapa permasalahan terjadi seperti keterbatasan sarana dan kemampuan sumber daya manusia (BPKP, 2019; Yamin & Ishak, 2018; Eryana, 2018; Asrori, 2014; Jatmiko, 2019; Farlina & Hartono, 2019). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menggunakan variabel akuntabilitas sebagai indikator untuk mengukur pengelolaan keuangan desa. Pemerintahan desa yang menjadi obyek penelitian adalah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah karena terdapat enam desa yang mengalami keterlambatan laporan pertanggungjawaban (hariankota.com, 2020). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor tersebut terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengurus pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak yang diakui sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk mendukung kemandirian desa maka pemerintah telah memberikan bantuan dana desa yang selanjutnya menjadi bagian dari APBDes. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban APBDes yang baik maka para aparatur desa harus mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas merupakan kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas di atasnya (Rasul, 2002; Kalimullah et al., 2012) atau kewajiban pemegang amanah (*agent*) memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan kepada *principal* (Mardiasmo, 2009; Setiawan et al., 2017). Modul LAN RI (2015) menyatakan akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Tingkat transparansi yang lebih tinggi dan pengukuran yang tepat berpengaruh pada peningkatan akuntabilitas pemerintah kepada warga serta merupakan faktor penentu untuk meningkatkan kualitas pemerintahan (Bauhr & Grimes, 2014). Akuntabilitas dapat berupa laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban lembaga publik dalam menunjukkan kinerja secara finansial kepada pemangku kepentingan (Zeyn, 2011) dan mempengaruhi kepuasan publik (Iyoha & Oyerinde, 2010). Menurut Aulia (2018),

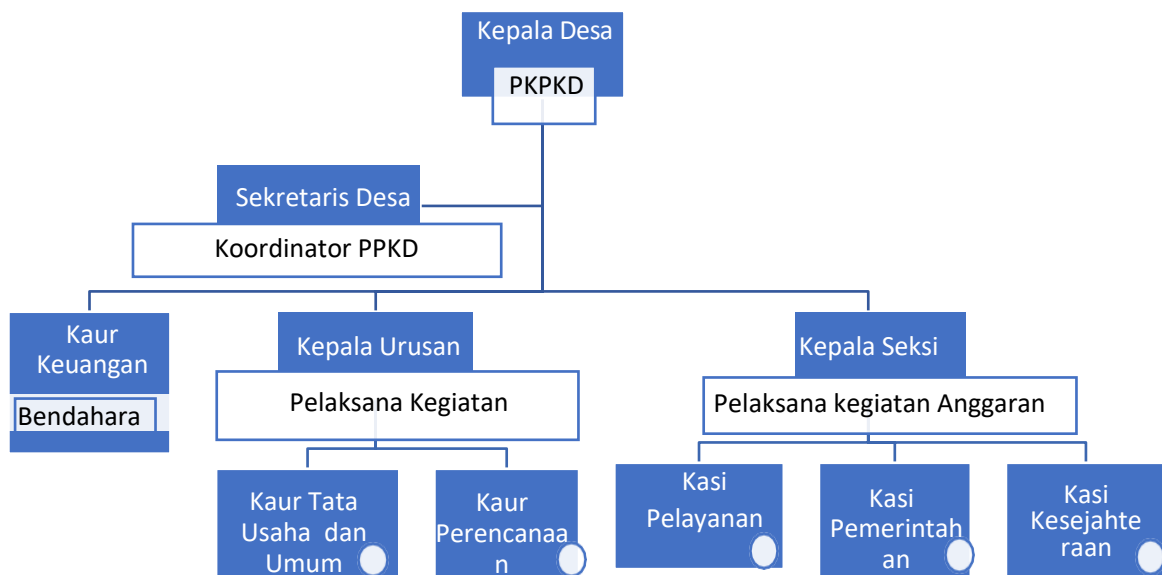
akuntabilitas memiliki indikator berupa kejujuran dan keterbukaan, kepatuhan pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi, dan ketepatan penyampaian laporan. Jadi akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang atau organisasi dalam pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berwenang sesuai kepentingannya.

Kompetensi aparat desa menciptakan kinerja yang membantu pemerintah desa mencapai tujuannya (Hasanah et al., 2020; Tuwaidan, 2014). Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan berdasarkan motivasi, sifat, konsep diri, pengetahuan, keahlian, dan sikap (Edison et al., 2016; Spencer & Spencer, 1993). Penelitian ini menilai kompetensi aparat desa mengenai pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dapat ditingkatkan apabila pemerintahan desa memiliki aparat desa yang dapat menyusun laporan keuangannya sendiri (Puspa & Prasetyo, 2020).

Aparat desa berperan dalam memberdayakan masyarakat dan sumber daya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai tanggung jawabnya (Yesinia et al., 2018; Kusumaningrum et al., 2020). Aparat desa berperan dalam memposting APBDes ke aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah di desa (Sulina et al., 2017). Teknologi informasi bermanfaat dalam mendukung proses bisnis, produktivitas dan akuntabilitas organisasi sektor publik dan pemerintahan (Karmila et al., 2014; Sugiarti & Yudianto, 2017; Zhou et al., 2021).

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dibantu pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kaur Keuangan. Jumlah aparat pengelola keuangan desa juga ditentukan berdasarkan jenis desanya. Desa swasembada dan swakarya memiliki pengelola keuangan berjumlah 8 (delapan) aparat sedangkan desa swadaya memiliki 6 (enam) aparat.

Gambar 1. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (diolah peneliti)

Penelitian Hasanah et al. (2020) menunjukkan secara parsial kompetensi aparatur pengelola keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Aziiz & Prastiti (2019), Karyadi (2019), Puspa & Prasetyo (2020), Yulianti et al. (2019), Mada et al., (2017), Aulia (2018), serta Sugiarti & Yudianto (2017). Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Triyono et al. (2019), dan Anggraeni & Yuliani (2019).

Penelitian Setiana & Yuliani (2017) menyatakan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Yesinia et al. (2018) dan Purba (2020). Perbedaan hasil penelitian lainnya ditunjukkan dari penelitian Anggraeni & Yuliani (2019) yang menyatakan bahwa hasil yang diperoleh tidak adanya pengaruh antara peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Aziiz & Prastiti (2019) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Anggraeni & Yuliani (2019), Sugiarti & Yudianto (2017), Aulia (2018), serta Yulianti et al. (2019). Penelitian dengan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Riyadi & Kurnadi (2020), serta Karyadi (2019). Kedua penelitian tersebut meneliti pemanfaatan teknologi informasi yang memperoleh hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Tabel 1. Ikhtisar Hasil Penelitian Sebelumnya

Variabel	Peneliti (Berpengaruh signifikan)	Peneliti (Tidak berpengaruh/tidak signifikan)
Kompetensi Aparat Desa	Hasanah et al. (2020), Aziiz & Prastiti (2019), Aulia (2018), Karyadi (2019), Mada et al. (2017), Prasetyo & Puspa (2020), Sugiarti & Yudianto (2017), Yulianti et al. (2019)	Triyono et al. (2019), Anggraeni & Yuliani (2019),
Peran Aparat Desa	Yesinia et al. (2018), Purba (2020), Setiana dan Yuliani (2017)	Anggraeni & Yuliani (2019)
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aziiz & Prastiti (2019), Anggraeni & Yuliani (2019), Aulia (2018), Sugiarti & Yudianto (2017), Yulianti et al. (2019)	Karyadi (2019), Riyadi & Kurnadi (2020)

Sumber: diolah peneliti

Pengembangan Hipotesis

Aparat desa akan dapat memahami prosedur pengelolaan dana desa lebih baik jika memiliki kompetensi (Hasanah et al., 2020). Semakin tingginya kompetensi aparat desa mampu mencapai akuntabilitas. Sebaliknya, rendahnya kompetensi aparat desa maka keuangan akan tidak akuntabel (Yulianti et al., 2019). Peran merupakan perilaku seseorang berdasarkan posisi sosial secara informal maupun formal. Sunarti et al. (2020). Perangkat desa diharapkan berperan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang dimiliki (Yesinia et al., 2018). Apabila pengelolaan keuangan desa sudah baik berarti peran perangkat desa telah dikerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya (Kusumaningrum et al., 2020). Berdasarkan penelitian (Yesinia et al., 2018), baiknya peran dari aparat desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi perlu diterapkan dalam pemerintahan seiring meningkatnya kebutuhan terutama dalam ketersediaan informasi yang cepat dan akurat (Apriyansyah et al., 2018). Keuangan desa akan lebih cepat dikelola apabila dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempercepat penyampaian laporan keuangan karena integrasi antara laporan dari pemerintah desa ke pusat semakin mudah (Anggraeni & Yuliani, 2019). Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Kompetensi, peran, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa

Menurut (Anggraeni & Yuliani, 2019), aparat desa yang memiliki kompetensi dapat lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatannya. Akuntabilitas dapat tercipta apabila aparat desa berkompeten dalam mengelola keuangan di desa. Aparat desa yang memiliki kompetensi akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan. Keterlibatan sumber daya manusia sangat penting untuk menciptakan laporan yang berkualitas (Ferina et al., 2016). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mada et al. (2017), Aziiz & Prastiti (2019), Karyadi (2019), Puspa & Prasetyo (2020), Yulianti et al. (2019), Aulia (2018), serta Sugiarti & Yudianto (2017) yang menyebutkan bahwa kompetensi aparat desa memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa

Perangkat desa diharapkan berperan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang dimiliki (Yesinia et al., 2018). Menurut Anggraeni & Yuliani (2019), hubungan kerja sama terutama antara kepala desa akan meningkatkan akuntabilitas karena pelaksanaannya akan lebih terbuka. Apabila seluruh aparat desa telah berperan dalam mengelola keuangan maka akan dapat saling melakukan pengawasan dalam mengelola keuangan. Apabila pengelolaan keuangan desa sudah baik, berarti peran perangkat desa telah dikerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya (Kusumaningrum et al., 2020). Hasil penelitian Setiana & Yuliani (2017), Yesinia et al. (2018), dan Purba (2020) menyatakan peran aparat desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Peran Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa

Alasan utama teknologi informasi dimanfaatkan dalam pengelolaan dana desa adalah efisiensi, kemudahan, penghematan waktu, dan biaya. Pemerintah desa memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai untuk menerapkan prinsip akuntabilitas (Aulia, 2018). Pembuatan laporan pertanggungjawaban menggunakan aplikasi akan mengurangi kesalahan. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Yulianti et al. (2019), Aulia (2018), Anggraeni & Yuliani (2019), dan (Aziiz & Prastiti, 2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa

METODE

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara mengumpulkan data kuesioner atau angket yang disebarkan ke responden. Selain itu peneliti melakukan wawancara untuk menggali informasi. Data sekunder penelitian ini bersumber dari laporan pemerintah kabupaten dan desa terkait. Pemilihan sampel ditentukan menggunakan nonprobability sampling dengan teknik sampling sensus/jenuh.

Responden pada penelitian ini adalah pengelola keuangan desa terdiri dari kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari kepala seksi dan kepala urusan (kaur) keuangan pada 13 kantor pemerintahan desa di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Setiap Desa di Kecamatan Mojogedang memiliki delapan aparat sehingga jumlah responden dalam penelitian ini 104 orang. Dari 104 kuesioner, diperoleh 96 kuesioner yang dikembalikan dan terisi lengkap. Kuesioner terdiri dari 55 pernyataan yang harus dijawab seluruhnya oleh responden. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan nilai total skor jawaban responden dengan bantuan program *excel*, *Eviews* dan *SPSS*.

Responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan memilih jawaban dalam skala Likert antara 1 (menunjukkan pernyataan sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (menunjukkan pernyataan sangat setuju). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan variabel independen adalah kompetensi aparat desa, peran aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 2. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala	Ket
Kompetensi Aparat desa	Kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan secara benar serta unggul dalam hasilnya berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap (Edison et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Keahlian • Pengalaman (disimpulkan dari Nofianti & Suseno, (2014); Spencer & Spencer (1993)). 	Interval	Likert 1-5
Peran Aparat desa	Seseorang menjalankan peranan apabila memiliki kedudukan (status) yang dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sesuai status tersebut (Soekanto, 2002).	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan • Pemenuhan tugas • Kontribusi aktif (disimpulkan dari Anggraeni & Yuliani (2019)). 	Interval	Likert 1-5
Pemanfaatan teknologi informasi	Penggunaan yang optimal terhadap penggunaan komputer (<i>mainframe, mini, micro</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), <i>database</i> , jaringan (internet, intranet), <i>e-commerce</i> , dan jenis lainnya (Wilkinson et al., 2000).	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan • Proses komputerisasi • Ketersediaan (disimpulkan dari Aulia (2018); Rahmi et al. (2019)). 	Interval	Likert 1-5
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (agent) dalam memberikan pertanggungjawaban kegiatan kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan Informasi • Kepatuhan Pelaporan • Kesesuaian Peraturan (disimpulkan dari Mahmudi (2011); Ardiani (2018)). 	Interval	Likert 1-5

Sumber: diolah peneliti

Teknik penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear berganda. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel, hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji simultan (F-test) dan uji parsial (t-test). Sedangkan uji asumsi dalam penelitian ini menggunakan adalah uji normalitas, validitas, heterokedastisitas, dan multikolinearitas.

Tabel 3. Pengukuran Variabel Demografi

Variabel Demografi	Skala	Keterangan
Jenis Kelamin	Nominal	Laki-laki/Perempuan
Umur	Ordinal	<30/30-40/41-50/>50
Jabatan	Nominal	Kepala desa/Sekdes/Kaur/Kasi/Staff
Lama Menjabat	Ordinal	<5/5-10/11-20/>20

Tingkat Pendidikan	Ordinal	SMP/SMA/D3/S1/S2/S3
--------------------	---------	---------------------

Sumber: diolah peneliti

Penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Analisis tersebut menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 016). Model dengan analisis regresi linier berganda penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut:

$$\text{Akun} = \alpha + \beta_1\text{Komp} + \beta_2\text{Peran} + \beta_3\text{Tekno} + e$$

Keterangan:

Akun = Akuntabilitas pengelolaan dana desa

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi kompetensi aparat desa

β_2 = koefisien regresi peran aparat desa

β_3 = koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi

Komp = variabel kompetensi aparat desa

Peran = variabel peran aparat desa

Tekno = variabel pemanfaatan teknologi informasi

e = standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak di Indonesia yaitu 8.562 (BPS, 2020). Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan memperoleh total dana desa sebesar Rp169.314.064.000,00 yang disalurkan ke 162 desa di tahun 2021. Berdasarkan data dari BPS, Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan tingkat kemiskinan sejak diluncurkannya dana desa, dari 12,62% di tahun 2014 menjadi 10,28% di tahun 2020. Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kecamatan Karanganyar mengalami peningkatan dari 67,85 di tahun 2014 menjadi 70,94 di tahun 2018. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2020, Kecamatan Mojogedang mendapatkan total dana desa sebesar Rp15.411.617.000,00. Hasil analisis deskriptif statistik untuk variabel independen dan variabel dependen berdasarkan jawaban tiap responden pada kuesioner diperoleh hasil pada tabel 4.

Tabel 4. Data Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev	Median
Kompetensi Aparat Desa	1	5	3,3421	0,921	4
Peran Aparat Desa	1	5	3,7035	0,714	4
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	5	3,7628	0,851	4
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	1	5	3,8501	0,655	4

Sumber: Diolah dari Rekapitulasi Jawaban Responden

Berdasarkan tabel 4, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki nilai rata-rata tertinggi dan standar deviasi terendah. Aparat desa cenderung memberikan jawaban setuju pada kuesioner variabel akuntabilitas merupakan faktor penting dalam mengelola keuangan. Variabel kompetensi aparat desa menunjukkan nilai rata-rata terendah dan standar deviasi yang tinggi. Hasil analisis deskriptif berdasarkan tiap indikator pernyataan variabel pada kuesioner ditunjukkan pada tabel 5.

Berdasarkan tabel 5, nilai rata-rata tertinggi pada variabel kompetensi aparat desa terdapat pada pernyataan materi pelatihan yang diberikan desa telah sesuai kebutuhan, sedangkan terendah ditunjukkan pada pernyataan penyusunan laporan keuangan yang tidak

ditemukan kesalahan. Korelasi tertinggi pada pernyataan terkait penguasaan aparat desa terhadap akun-akun dan pos rincian laporan keuangan, sedangkan pernyataan latar belakang pendidikan yang dimiliki aparat desa berkaitan dengan pengelolaan keuangan memperoleh korelasi terendah.

Tabel 5. Rekapitulasi Statistik Deskriptif dari tiap Pernyataan Kuesioner

Variabel	Rata-rata		Korelasi	
	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
Kompetensi Aparat Desa	3,68	2,69	0,828	0,444
Peran Aparat Desa	3,80	3,57	0,801	0,650
Pemanfaatan Teknologi Informasi	4,29	3,31	0,757	0,485
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	4,14	3,54	0,841	0,449

Sumber: Diolah dari Rekapitulasi Jawaban Responden

Nilai rata-rata tertinggi pada variabel peran aparat desa pada pernyataan partisipasi dan kehadiran warga untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah sudah memenuhi jumlah yang ditetapkan, sedangkan nilai pada pernyataan peran aktif aparat desa dalam mengumpulkan partisipasi warga dalam setiap pertemuan masyarakat. Korelasi tertinggi terdapat pada pernyataan aparat desa selalu terlibat dalam penyusunan APBDes, sedangkan korelasi terendah terdapat pada pernyataan peran aparat desa dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Nilai rata-rata tertinggi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi terdapat pada pernyataan jaringan internet yang telah memadai. Nilai rata-rata terendah pada pernyataan penggunaan website untuk memuat pengelolaan dan perkembangan kegiatan desa, juga merupakan nilai korelasi tertinggi, sedangkan korelasi terendah terdapat pada pernyataan penggunaan komputer yang dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Nilai rata-rata tertinggi pada variabel akuntabilitas terdapat pada pernyataan semua penerimaan dan pengeluaran desa sudah melalui rekening kas desa. Korelasi tertinggi terdapat pada pernyataan laporan pertanggungjawaban yang dibuat aparat desa telah memuat realisasi penggunaan dana desa. Nilai rata-rata terendah dan korelasi terendah terdapat pada pernyataan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dapat diketahui oleh masyarakat.

Uji validitas menggunakan *Product Moment Pearson's Correlation* menunjukkan nilai r tabel sebesar 0,1986 ($n = 96$; $\alpha = 0,05$). Satu pernyataan dengan nilai r hitung lebih kecil dari 0,1986 sehingga tidak valid. Untuk itu kuesioner semula 55 pernyataan berkurang menjadi 54 pernyataan.

Uji reliabilitas (lampiran 1) penelitian ini menggunakan nilai *Cronbach's alpha*. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga instrumen penelitian ini reliabel. Hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 6.

Uji normalitas menggunakan analisis grafik dan one sample *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,116 (lebih besar dari 0,05), maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas sebagaimana ditunjukkan dalam grafik histogram dan grafik plot normalitas (lampiran 1).

Uji linearitas menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel independen memiliki hubungan linear dengan variabel dependen. Grafik *scatterplot* (lampiran 1) menunjukkan titik menyebar, tidak membentuk pola bergelombang melebar dan menyempit sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji park menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$ berarti data tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 6 juga

menunjukkan nilai VIF pada ketiga variabel berada dibawah 10,00 sehingga variabel tersebut tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Jenis Uji	Variabel	differences	Signifikansi (α) / VIF
Uji Normalitas	Uji Kolmogorov-Smirnov		>0,05	0,116
Uji Heteroskedastisitas	Uji Park	Kompetensi Aparat Desa	>0,05	0,316
		Peran Aparat Desa	>0,05	0,90
		Pemanfaatan Teknologi Informasi	>0,05	0,292
Uji Multikolinearitas	Collinearity Statistics (VIF)	Kompetensi Aparat Desa	<10	2,422
		Peran Aparat Desa	<10	2,004
		Pemanfaatan Teknologi Informasi	<10	1,334
Uji Linearitas	Deviation from Linearity	Kompetensi Aparat Desa	>0,05	0,832
		Peran Aparat Desa	>0,05	0,181
		Pemanfaatan Teknologi Informasi	>0,05	0,150
Uji Autokorelasi	Durbin Watson	-	dU = 1,7326 4-dU = 2,2674	1.885

Sumber: Diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel Analisis regresi linier berganda, model persamaan yang menunjukkan pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, adalah sebagai berikut:

$$Akun = 21,480 + 0,034Komp + 0,504Peran + 0,217Tekno + e$$

Tabel 7. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	21.480	4.417	4.863	.000
Kompetensi Aparat Desa	.034	.089	.385	.701
Peran Aparat Desa	.504	.098	5.152	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.217	.084	2.594	.011

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t ditunjukkan pada tabel 8. Koefisien determinasi berdasarkan *Adjusted R Square* sebesar 0,458 menunjukkan model penelitian ini bisa menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 45,8% dan sisanya sebesar 54,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji simultan F menunjukkan nilai 27,796 (lebih besar dari Ftabel 2,70) dan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05) sehingga disimpulkan hipotesis 1 diterima, yaitu kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Variabel kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Uji t dilakukan dengan melihat apabila signifikansi $< 0,05$ berarti hipotesis diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Uji	Variabel	R ²	Adj R ²	F	t	Sig.
Koefisien Determinasi	-	0,475	0,458			
Uji F (simultan)	-			27,796		0,000
Uji t (parsial)	Kompetensi Aparat Desa				0.385	0.701
	Peran Aparat Desa				5.152	0.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi				2.594	0.011

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil uji parsial ini menunjukkan variabel peran aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kecuali variabel kompetensi aparat desa. Dengan demikian, hasil uji parsial terhadap hipotesis adalah sebagai berikut:

- Hipotesis 2 tidak diterima yaitu kompetensi aparat desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
- Hipotesis 3 diterima yaitu peran aparat desa secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
- Hipotesis 4 diterima yaitu pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, aparat desa se-Kecamatan Mojogedang kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sejalan Sugiarti & Yudianto (2017) dan Yulianti et al. (2019) yang menunjukkan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan variabel lain yang diteliti berpengaruh terhadap akuntabilitas secara simultan. Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari peraturan desa yang memuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Aparat desa merupakan pihak yang berperan paling besar dalam penyusunan peraturan desa. Aparat desa memerlukan kemampuan untuk menyusun pertanggungjawaban dalam peraturan desa sehingga laporan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyampaian pertanggungjawaban keuangannya.

Variabel akuntabilitas menunjukkan rata-rata tertinggi pada pernyataan tentang penerimaan dan pengeluaran desa telah dilakukan melalui rekening kas desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri no. 20 tahun 2018 yang mengatur penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa. Rekening kas desa merupakan alat pengendalian dan pengklasifikasian terhadap penerimaan, pengeluaran, maupun transfer yang dilakukan pemerintah. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari rekening desa oleh bendahara desa berdasarkan nota kredit dari bank agar dapat dilakukan pengawasan. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa yang disertai oleh bukti yang lengkap dan sah. Selain itu, rekening kas desa berguna untuk menghindari penerimaan dan pengeluaran untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan jawaban responden, rata-rata terendah pada variabel akuntabilitas ditunjukkan pada pernyataan terkait penyusunan laporan keuangan desa telah melibatkan masyarakat desa. Berdasarkan penelitian Maros et al (2021), faktor penghambat partisipasi masyarakat salah satunya berkaitan dengan faktor pekerjaan masyarakatnya. Berdasarkan data monografi Kecamatan Mojogedang tahun 2019, masyarakat yang bekerja sebagai petani berjumlah 27.670 atau 62,2% dari total masyarakat yang berusia lebih dari 20 tahun. Rendahnya partisipasi bisa disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, yang sebagian besar bekerja sebagai petani, terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Salah satu aspek akuntabilitas menurut Modul LAN (RI, 2015) adalah membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*). Laporan kinerja menunjukkan kemampuan menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Syarat menjadi aparatur yang akuntabel antara lain adalah kompetensi yang sesuai bidang tugas. Untuk mencapai akuntabilitas maka terdapat tuntunan perilaku PNS (*personal behaviour*) yang menunjukkan peran yang diharapkan. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk transparansi pengelolaan keuangan dan untuk itu diperlukan akses informasi dan dukungan teknologi seperti media informasi, komputer dan akses internet.

Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Triyono et al. (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Anggraeni dan Yuliani (2019) menyatakan kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas disebabkan karena kurangnya pelatihan pengelolaan keuangan. Berdasarkan data responden penelitian ini sebanyak 96 orang yang mengisi kuesioner, para pengelola keuangan desa mempunyai jenjang pendidikan paling banyak pada tingkat SMA/K yaitu 53 orang atau 55,21%. Hasil lain terdapat 43,75% aparat desa belum pernah mengikuti pelatihan dan 48,96% hanya mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan sebanyak 1-2 kali dan paling besar mempunyai pengalaman kerja dalam mengelola laporan keuangan kurang dari satu tahun 33 orang atau 34,38%.

Berdasarkan analisis kompetensi responden tersebut maka kompetensi tidak menjadi substansi pokok dalam pengelolaan laporan keuangan desa, cukup berbekal pendidikan sekolah menengah, pengalaman dan pelatihan yang rendah. Alasan lain kurangnya peran kompetensi adalah transaksi keuangan dana di desa yang sederhana, hanya pencatatan berupa uang masuk dan keluar (*cash basis*). Laporan keuangan desa berbentuk sederhana dan belum menggunakan standar akuntansi. Pada saat ini sudah terdapat aplikasi komputer untuk membantu pembuatannya. Aplikasi ini mudah dioperasikan dan tidak memerlukan keahlian khusus bagi para penggunanya. Penyedia aplikasi adalah instansi pemerintah seperti Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh BPKP, dan berbagai aplikasi sederhana yang dikembangkan oleh setiap daerah. Selain itu pemerintah daerah bekerjasama dengan aparatur pengawas daerah aktif melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kapasitas aparatur desa. Dengan demikian meskipun latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan pencatatan dan pelaporan keuangan, namun para pengelola keuangan desa cukup mampu menyesuaikan diri dan memenuhi pelaksanaan tugasnya. Hasil penelitian Wungow et al. (2016) menyatakan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena sebagian besar pengelola keuangan tidak berpendidikan akuntansi dan tidak ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Syarat untuk menjadi pengelola keuangan di desa saat ini hanya berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat dan tidak ada syarat khusus terkait kemampuan mengelola keuangan. Permendagri Nomor 83 tahun 2015 juga menyatakan bahwa syarat untuk menjadi perangkat desa minimal

berpendidikan SMA. Astini et al. (2019) menyatakan pengalaman aparat desa bukan merupakan penentu keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan adanya bantuan pendampingan kepada aparat desa.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Basri et al (2020) yang menyatakan semakin tinggi pendidikan dan pengalamannya maka pengelolaan keuangan semakin baik. Penelitian Murina & Rahmawaty (2017) juga menyatakan semakin lama pengalaman bekerja yang dimiliki aparat desa, maka akan meningkatkan pemahaman laporan keuangan desa. Dalam penelitian ini diketahui hanya 21 orang dari 96 responden atau sebesar 21,88% yang memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun dalam mengelola keuangan. Penelitian ini belum dapat membuktikan aparat desa yang berpengalaman mampu membuat laporan keuangan yang lebih akuntabel, karena pengalaman aparatur desa yang kurang dari satu tahun paling besar yaitu 33 orang atau 34,38%. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan hasil pemeriksaan atas laporan tidak menemukan kesalahan yang bersifat material. Hasil penelitian Eriva et al. (2013) menyatakan aparat desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi belum tentu mampu menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan desa. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Wati et al. (2014) yang menyatakan kompetensi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tidak mengalami salah saji material dan kesalahan yang mungkin terjadi.

Hasil pengamatan menunjukkan sebagian besar proses penatausahaan dan pengelolaan keuangan sebenarnya hanya dijalankan oleh beberapa orang saja, salah satunya yaitu bendahara desa. Padahal aparat desa yang bertugas sebagai pengelola keuangan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi. Hal tersebut mungkin menyebabkan timbulnya kemungkinan bias dalam penelitian ini yang menjadi responden penelitian ini. Tidak semua aparat desa mendapatkan pelatihan karena tugas mengelola keuangan difokuskan pada bendahara desa. Penelitian (Hasisudin et al., 2020) menunjukkan penatausahaan dan pertanggungjawaban menjadi lebih baik setelah bendahara desa diberikan pelatihan.

Pengaruh Peran Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparat desa berpengaruh paling besar terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yesinia et al (2018) dan Setiana dan Yuliani (2017). Pernyataan terkait aparat desa selalu terlibat dalam penyusunan APBDes menunjukkan nilai rata-rata tertinggi. Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan merupakan pertanggungjawaban pada seluruh proses pengelolaan keuangan yang salah satunya adalah penyusunan anggaran. Masyarakat desa juga ikut berperan dalam penentuan prioritas penyusunan anggaran. Peran kepala desa dalam menyusun anggaran yaitu sebagai penanggung jawab dalam persiapan dan penetapan anggaran. Peran sekretaris desa bersama dengan aparat desa lainnya yaitu menyusun dan mendokumentasikan penyusunan anggaran.

Penyusunan anggaran di Kecamatan Mojogedang diawali dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang juga melibatkan masyarakat desa. Hasil penelitian Kasenda et al., (2018) menunjukkan prinsip akuntabilitas dapat dicapai karena musrenbangdes dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah terlaksana dengan baik. Musrenbangdes yang dilakukan di Kecamatan Mojogedang biasanya dilaksanakan pada bulan Juni yang dihadiri oleh pemerintah desa, LKD, BPD, dan unsur masyarakat. Musrenbangdes dilakukan untuk menentukan tingkat urgensi dan prioritas pembangunan yang sejalan dengan RPJMDes. Hasil dari musyawarah tersebut akan ditetapkan dalam RKP Desa yang nantinya dianggarkan dalam APBDes.

Hasil penelitian Pahlawan et al. (2020) menunjukkan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa akan mengurangi

penyimpangan. Berdasarkan penelitian Maros et al. (2021), pemerintah desa memiliki peran terbesar dalam mengambil keputusan. Pemerintah desa yang tidak berperan aktif akan menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak partisipatif dan bersifat *top down*. Peran aktif yang dapat dilakukan oleh aparat desa untuk mengumpulkan partisipasi warga salah satunya dengan sosialisasi. Hasil penelitian Ta'dung & Lusdani (2020) menunjukkan kurangnya sosialisasi dari aparat desa menjadi salah satu penyebab ketidakhadiran masyarakat untuk berpartisipasi dalam musrenbangdes. Hasil berbeda ditunjukkan penelitian Anggraeni & Yuliani (2019) yang menyatakan bahwa peran aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas karena peran aparat desa pada penelitian tersebut belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua aparat desa ikut terlibat dalam tahapan pengelolaan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugiarti & Yudianto (2017) yang menyatakan pentingnya penggunaan teknologi untuk membantu proses penyusunan laporan. Penggunaan teknologi komputer sangat membantu mengelola data keuangan lebih cepat dan akurat. Hasil observasi menunjukkan kantor desa sudah mempunyai peralatan komputer yang memadai dan didukung sarana internet. Jawaban responden juga menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi pada pernyataan jaringan internet di kantor desa telah memadai.

Pernyataan terkait penggunaan komputer dan internet dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan menunjukkan nilai rata-rata tertinggi. Penggunaan teknologi dapat mempercepat penyelesaian laporan keuangan sehingga tepat waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aziiz dan Prastiti (2019) yang menyatakan bahwa penggunaan internet mempermudah sistem administrasi keuangan. Pengelolaan dan pengiriman data antar instansi pemerintah akan lebih mudah dan cepat apabila menggunakan internet. Penggunaan aplikasi Siskeudes juga membantu dalam pelaporan dan pengawasan sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih akuntabel. Penelitian Anggraeni dan Yuliani (2019) menyatakan pemanfaatan teknologi terutama sistem yang terkomputerisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Setiap desa di Kecamatan Mojogedang sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan atau Siskeudes dalam mengelola keuangan. Sejak tahun 2019, aplikasi Siskeudes 2.0 sudah digunakan di seluruh desa se-Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian Welley et al. (2018) menunjukkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik apabila menggunakan Siskeudes. Siskeudes berguna untuk mempermudah dan mempercepat aparat pengelola keuangan desa dalam menyusun maupun menyampaikan informasi keuangan kepada pemerintahan lainnya.

Penelitian Imawan et al. (2019) menyimpulkan *website* yang dimiliki setiap desa dapat menciptakan penyampaian informasi secara terbuka, cepat, dan tepat. *Website* tersebut digunakan sebagai media akuntabilitas untuk menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa yang salah satunya adalah laporan pertanggungjawaban. Hasil pengamatan menunjukkan pengelolaan kegiatan desa masih jarang dimuat di *website*. Hal ini sesuai dengan jawaban kuesioner terkait penggunaan *website* mendapat nilai rata-rata terendah. Informasi keuangan di Kecamatan Mojogedang masih banyak menggunakan media papan informasi saja. Hasil penelitian Rahayu & Aji (2019) menunjukkan *website* desa belum dibutuhkan karena masyarakat desa tidak terlalu bergantung pada teknologi dan internet. Papan informasi berupa spanduk atau baliho yang ditampilkan sudah cukup bagi masyarakat desa karena lebih mudah dan bisa dilihat kapan saja. Tidak semua desa di Kecamatan Mojogedang memiliki *website* desa dan saat ini masih mengandalkan *website* kecamatan dalam penyampaian informasi.

PENUTUP

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa se-Kecamatan Mojogedang. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan variabel kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akuntabilitas ini terwujud karena adanya kemampuan aparatur desa dalam menyajikan laporan keuangan, peran aktif aparatur bersama masyarakat dalam musrenbangdes dan dukungan teknologi berupa komputer, akses internet dan aplikasi Siskeudes.

Sedangkan secara parsial Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini diperoleh dari jumlah aparatur desa dengan tingkat pendidikan SMA dan pengalaman kurang dari satu tahun lebih mendominasi daripada aparatur berpendidikan tinggi dan berpengalaman lebih dari empat tahun. Faktor lain adalah akuntabilitas berupa transaksi dan laporan keuangan desa masih berbentuk sederhana sehingga tidak diperlukan keterampilan khusus dalam pengelolaannya. Adanya aplikasi komputer dan pendampingan petugas juga mempengaruhi kemampuan pengelolaan laporan keuangan.

Peran aparatur desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa mampu mengajak partisipasi warga dalam musrenbangdes seperti menentukan prioritas dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan serta selalu hadir dalam penyusunan APBDes.

Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Setiap desa telah mempunyai perangkat komputer yang memadai dan didukung internet dalam mengelola laporan keuangan. Sedangkan *website* desa masih terbatas dan belum digunakan secara maksimal.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi. Namun dalam prakteknya, pengelolaan keuangan hanya dilakukan oleh salah satu atau dua orang aparatur desa. Untuk itu rekomendasi atas penelitian akuntabilitas laporan keuangan berikutnya agar lebih selektif dalam menentukan responden, tidak menggunakan seluruh PPKD sebagai sampel untuk mengukur kompetensi pengelolaan keuangan. Responden bisa dipilih seperti bendahara desa saja, karena Kaur dan Kasi desa hanya mengurus pelaksanaan teknis kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, P., & Mellemvik, F. (2011). The rise and fall of accruals: a case of Nepalese central government. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 1(2), 123–143. <https://doi.org/10.1108/204211611111138495>.
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). *Journal Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy*, 14(2), 15–30.
- Apriyansyah, Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 4(1), 10–24.
- Ardiani, S. (2018). Pengaruh Integritas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*.

- Asrori, A. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 101–116. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>.
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati. (2019). Determinan yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Valid*, 16(1), 29–47.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology*, Tenth Edition Paul, 53(9), 1689–1699.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>.
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>.
- Bauhr, M., & Grimes, M. (2014). Indignation or Resignation: The Implications of Transparency for Societal Accountability. *Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions*, 27(2), 291–320.
- BPKP. (2019). Jaringan Listrik dan Internet Masih Menjadi Kendala Penerapan Aplikasi Siskeudes Versi 2.02. *BPKP Online*. <http://www.bpkp.go.id/berita/readunit/31/23117/40/Jaringan-Listrik-dan-Internet-Masih-Menjadi-Kendala-Penerapan-Aplikasi-Siskeudes-Versi-2.02-> (diakses pada 10 Juni 2020).
- BPS. (2020). *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2020*. Karanganyar: Badan Pusat Statistik Karanganyar.
- BPS. (2021). *Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016-2020*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- BPS. (2021). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021*. Karanganyar: Badan Pusat Statistik Karanganyar.
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kerja Karyawan dan Organisasi*. Al-Fabeta.
- Eriva, C. Y., Isalhuudin, & Darwanis. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja dan Jabatan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Eryana. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Iqtishaduna Journal*, Juni(2), 89–95.
- Farlina, W., & Hartono, Y. (2019). Analysis of Factors That Influence on Reporting of Dana Desa Programs. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 7(2), 192–201. <https://doi.org/10.31846/jae.v7i2.218>.
- Ferina, I. S., Burhanuddin, & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(6). <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/article/view/3991/2036>.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multi Variat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17–27. <https://doi.org/10.18196/rab.040149>.

- Hasisudin, M., Jenod, K., & Saleh, M. (2020). Inovasi Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Tambora*, 4(2).
- Huque, A. S. (2011). Accountability and governance: Strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 60(1), 59–74. <https://doi.org/10.1108/17410401111094312>.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>.
- Iyoha, F. O., & Oyerinde, D. (2010). Accounting infrastructure and accountability in the management of public expenditure in developing countries: A focus on Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(5), 361–373. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.06.002>.
- Jatmiko, U. (2019). Analisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. *OSF Preprints*, 113, 1–13. <https://osf.io/preprints/ah9mk/>
- Kalimullah, N. A., Alam, K., & Nour, M. (2012). New Public Management: Emergence and Principles. *BUP Journal*, 1(1), 1–22.
- Karmila, Tanjung, A. R., & Darlis, E. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Pemerintah Daerah. *Jurnal SOROT*, 9(1), 1–121. <https://doi.org/10.1557/proc-279-201>.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani*, 7(2).
- Kasenda, T., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Going Concern: *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 102–110. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20907.2018>.
- Keerasuntonpong, P., Manowan, P., & Shutibhinyo, W. (2019). Reforming government public accountability: the case of Thailand. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Kim, P. S. (2009). Enhancing public accountability for developing countries: major constraint and strategies. *Aust. J. Publ. Admin.*, 68(1), 89–100.
- Kusumaningrum, putri dewi, Suharno, & Widarno, B. (2020). Akuntabilitas, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi Teknologi*, 579–588.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press. Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Maros, A., Joko Sunaryo, N. A. H., & Esdhona, H. (2021). *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo*. 4(1), 1–6.
- Murina, S., & Rahmawaty. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 111– 120.
- Nofianti, L., & Suseno, N. S. (2014). Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and their Implications towards Performance Accountability. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 98– 105. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.056>.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>.
- Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Purba, S. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 3(1), 10–19. <http://repository.unwidha.ac.id/id/eprint/1579>.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>.
- Rahayu, A. M., & Aji, G. G. (2019). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan (Studi Kasus Pemanfaatan Website Desa di Kabupaten Bojonegoro). *Commercium*, 43–47.
- Rahmi, N. U., Sari, W., & Wulandari, B. (2019). The effect of information technology, quality of accounting information and understanding of students on accounting software users. *Journal of Physics: Conference Series*, 1230(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1230/1/012080>.
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- RI, L. A. N. (2015). *Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*.
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Influence of Information Technology Utilization , Budgeting Participation and Supervi. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(2), 160–168.

- Said, J., Alam, M. M., & Aziz, M. (2015). Public accountability system: empirical assessment of public sector of Malaysia. *Asian Journal of Scientific Research*, 8(2), 225–236.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap. *University Reseach Colloquim*, April, 205–210.
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia*, 1(2), 1–16.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan (Jakarta)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Sumarto, Sukarno W. (2020). *Akuntabilitas Dana Desa*. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. [https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA#:~:text=Dana%20Desa%20yang%20dialokasikan%20tahun,Pelayanan%20Perb%20endaharaan%20Negara%20\(KPPN\)](https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA#:~:text=Dana%20Desa%20yang%20dialokasikan%20tahun,Pelayanan%20Perb%20endaharaan%20Negara%20(KPPN)).
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 3, 580–590.
- Sulina, T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba- Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1–12.
- Sunarti, Kadir, S., & Masdul, M. R. (2020). Peran Aparat Desa dalam Menanggulangi Kekerasan di masyarakat di Desa Pomayagon Ditinjau dari Pendidikan Islam The Role of Village Apparatus in Tackling Violence in The Village of Pomayagon was Reviewed From Islamic Education. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).
- Ta'dung, Y. L., & Lusdani, W. (2020). Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1), 106801. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801>.
- Triyono, Achyani, F., & Arfiansyah, M. A. (2019). THE DETERMINANT ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUNDS MANAGEMENT (Study in the Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol 4, No 2 (2019), 118–135. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521>.
- Tuwaidan, M. (2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(3).
- Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal Ak. Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Welley, M. M., Koleangan, R. A. M., & Kawung, G. M. V. (2018). Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 79–91.
- Wilkinson, J. W., Cerullo, M. J., Raval, V., & Wing, W. O. B. (2000). *Accounting Information system essential Concepts and Application* (4th ed.). John Willry & Sons.
- Wungow, J. F., Lambey, L., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan Dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

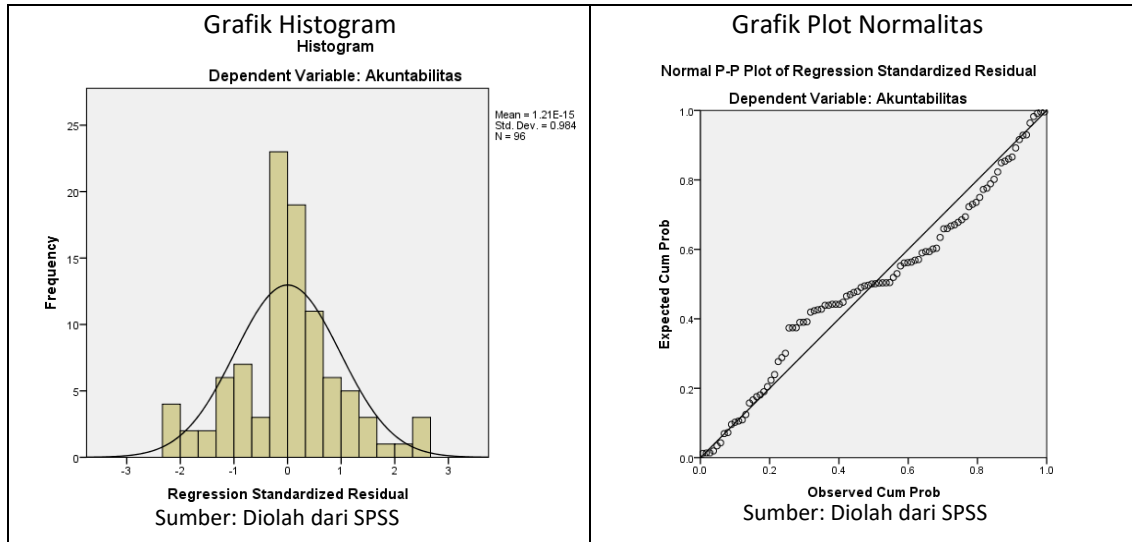
- Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 7(2), 174–188. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13560>.
- Yamin, M., & Ishak. (2018). The effect of employee's competency, application of performance-based budgeting and functional supervision on the performance (LKD) SKPD. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(8), 215–219.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112.
- Yulianti, W., Kamaliah, & Rasuli. (2019). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi*, 27(4), 386–398.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>.
- Zhou, J., Yu, L., & Choguill, C. L. (2021). Co-evolution of technology and rural society: The blossoming of taobao villages in the information era, China. *Journal of Rural Studies*, 83(February), 81–87. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.02.022>

Lampiran 1.

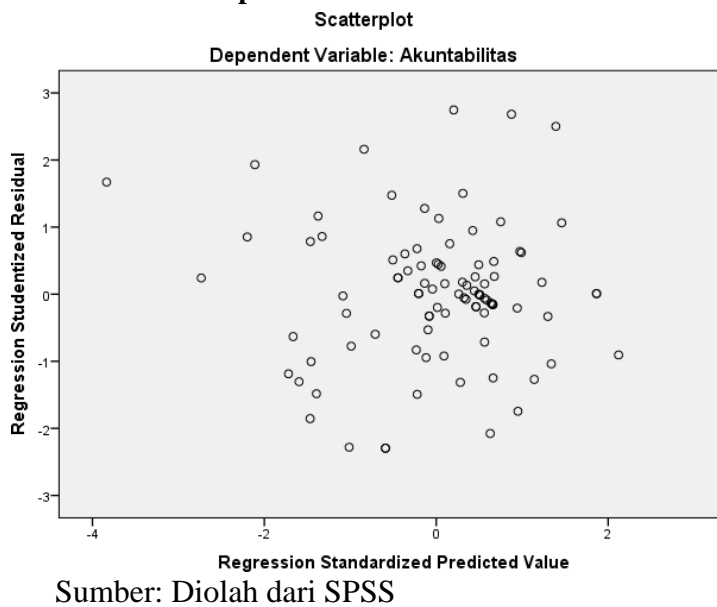
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Kompetensi Aparat Desa	0,930	13
Peran Aparat Desa	0,932	13
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,872	13
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0,912	15

Sumber: Diolah dari SPSS



Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas



Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	75	78,1%
		Perempuan	21	21,9%
		Total	96	100%
2	Usia	< 30 tahun	12	12,50%
		30-40 tahun	31	32,29%
		41-50 tahun	27	28,13%
		> 50 tahun	26	27,08%
		Total	96	100,00%
3	Lama Bekerja	< 5 tahun	34	35,42%
		5-10 tahun	26	27,08%
		11-20 tahun	21	21,88%
		> 20 tahun	15	15,63%
		Total	96	100,00%
4	Jenjang Pendidikan	SMP	6	6,25%
		SMA/K	53	55,21%
		D3	9	9,38%
		S1	28	29,17%
		Total	96	100,00%
5	Mengikuti pelatihan selama setahun	Belum pernah	42	43,75%
		1-2 kali	47	48,96%
		3-4 kali	5	5,21%
		> 4 kali	2	2,08%
		Total	96	100,00%
6	Pengalaman dalam mengelola keuangan	< 1 tahun	33	34,38%
		1-2 tahun	23	23,96%
		3-4 tahun	19	19,79%
		> 4 tahun	21	21,88%
		Total	96	100,00%

Sumber: Diolah dari SPSS